

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pada tahun 1997 ke tahun 1998 tunggakan mengalami kenaikan sebesar Rp 10.820.358,- atau sebesar 24,11%. Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 pembayaran PBB mengalami kelancaran, terbukti dengan turunnya jumlah wajib pajak yang terlambat atau menunggak pembayaran PBB, yaitu berturut-turut turun mulai Rp 9.588.048,- kemudian Rp 5.607.850,- dan berikutnya adalah Rp 3.163.983,-. Sedangkan prosentase penurunannya adalah berturut-turut turun mulai tahun 1999 yaitu 17,21%, tahun 2000 turun sebesar 12,16% dan pada tahun 2001 turun sebesar 7,81%. Hal ini menandakan masyarakat mulai sadar untuk membayar pajak.
2. Sedangkan pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, pembayaran PBB mengalami tunggakan kembali yang sifatnya fluktuatif, akan tetapi cenderung untuk turun dan tidak menimbulkan angka positif yang berarti lancar. Dimulai pada tahun 2001 ke tahun 2002 turun sejumlah Rp 26.900.881,- atau sebesar 72,07%, pada tahun 2002 ke tahun 2003 mengalami penurunan sebesar Rp. 31.675.449,- atau sebesar 49,31%. Pada tahun 2003 ke tahun 2004 pembayaran PBB mengalami kenaikan tunggakan sebesar Rp. 12.034.309,- atau sebesar 12,54%, sedangkan tahun 2004 ke tahun 2005 mengalami kenaikan lagi sebesar Rp

23.222.227,- atau sebesar 21,51%. Untuk tahun 2005 ke tahun 2006 tunggakan PBB mengalami kenaikan lagi sebesar Rp.73.514.819,- atau sebesar 56,05% hal ini jumlah terbesar selama hampir satu dasawarsa terakhir, yaitu separoh lebih dari wajib pajak mengalami keterlambatan pembayaran atau menunggak.

3. Analisis faktor menjelaskan suatu definisi atau variabel dapat dilihat *Total Variance Explained*. Pada kolom *% of variance* 24,531 yang artinya bahwa faktor-faktor yang digunakan dalam menjelaskan variasi sebesar 24,531% atau faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembayaran PBB di Kota Blitar yang mampu dijelaskan oleh model sebesar 24,531%.
4. Suatu faktor (atau dimensi) mendukung sebuah definisi atau variabel jika memiliki lebih besar atau minimal sama dengan 50%. Dari perhitungan ternyata yang memiliki angka di atas 50% adalah faktor pendapatan penduduk (0,542 atau 54,2%) dan subyek pajak yaitu (56,4%) artinya adalah Subyek pajak. Dari hasil penelitian ini dapat diperhatikan bahwa yang menjadi faktor pendukung dari kelancaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah faktor pendapatan penduduk dan subyek pajak.
5. Dari data halaman sebelumnya dapat dibuat urutan sebagai berikut : Subyek pajak dengan nilai *component* 56,4%, Pendapatan penduduk dengan nilai *component* 54,2%, Petugas Pajak dengan nilai *component* 49,2%, Waktu pajak dengan nilai *component* 47,9%, Tingkat

pendidikan dengan nilai *component* 44,5%, Peraturan Pajak dengan nilai *component* 43,7%. Setelah dilakukan pemeringkatan dari data yang ada, maka faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah faktor subyek pajak dan pendapatan penduduk.

6. Faktor pendapatan penduduk juga mempengaruhi pembayaran pajak kepada pemerintah, hal ini bisa dimaklumi karena dalam beberapa tahun terakhir ini perekonomian Indonesia dalam kondisi yang kurang menguntungkan dan efek dari hal ini adalah berkurangnya kesempatan kerja yang pada tahapan tertentu akan sulit dalam mencari pekerjaan. Karena angka pengangguran yang relatif tinggi, maka akan memicu turunnya pendapatan bagi masyarakat yang pada gilirannya akan mengurangi kesempatan masyarakat untuk membayar pajak, sehingga keterlambatan pembayaran PBB salah satunya disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang menurun.

## b. Saran

1. Perlu diupayakan dengan berbagai macam cara untuk menanggulangi faktor keterlambatan pembayaran PBB, hal ini merupakan faktor yang menentukan bagi pemerintah, karena dari sektor inilah pemerintah mulai bisa mengambil hatu rakyat dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat.

2. Pemerintah seharusnya sudah memikirkan penciptaan situasi ekonomi yang kondusif juga sangat penting bukan hanya bagi semua lapisan masyarakat saja akan tetapi juga untuk kepentingan negara khususnya penerimaan khususnya sektor pajak, keadaan sekarang gejolak politik justru memicu keputusan ekonomi.